



KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI INDONESIA MENYONGSONG MEA

Eha Saleha
Yuli Tirtariandi EA
FISIP Universitas Terbuka
Email: ehasaleha@ut.ac.id

Abstract

Isu pengarusutamaan gender menjadi salah satu topik yang mengemuka selama 10 tahun. Termasuk juga di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pengarusutamaan gender ini. Beberapa sektor tidak hanya bidang pendidikan sudah menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender ini. Artikel ini merupakan sebuah kajian literatur. Konsep yang dipergunakan untuk menganalisis isu pengarusutamaan gender adalah konsep implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Hasil kajian memperlihatkan bahwa beberapa Kementerian/Lembaga di pusat, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota telah memiliki dukungan politik, kelembagaan PUG, program yang responsif gender, data dan informasi berdasarkan menurut jenis kelamin, dan sumber daya manusia dengan keterampilan melaksanakan PUG.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejarah dunia mencatat tanggal 26 Juni 2015 sebagai hari penting bagi pejuang kebebasan seksual dimana Negara adidaya Amerika Serikat melegalkan hubungan atau pernikahan sejenis. Selain Amerika Negara lain telah terlebih dahulu melegalkan hal tersebut seperti negara Belanda pada tahun 2000, Belgia pada tahun 2003, Spanyol pada tahun 2005, Kanada tahun 2005, Afsel pada tahun 2006, Norwegia pada tahun 2009, Swedia pada tahun 2009, Portugal pada tahun 2010, Islandia pada tahun 2010, Argentina pada tahun 2010, Denmark pada tahun 2012, Brazil pada tahun 2013, Inggris pada tahun 2013, Prancis pada tahun 2013, Selandia Baru pada tahun 2013, Uruguay pada tahun 2013, Skotlandia pada tahun 2014, Luxemburg pada tahun 2015, Finlandia pada tahun 2015, Slovenia pada tahun 2015, Irlandia pada tahun 2015, Meksiko pada tahun 2015, dan terakhir Amerika Serikat pada tahun 2015.

Masyarakat Indonesiapun pada era 80-an tepatnya pada tanggal 19 April 1981 dikejutkan dengan pemberitaan perkawinan dua wanita lesbian yang digelar di Pub daerah Blok M Jakarta Selatan dan dihadiri sekitar 120 undangan. (Shalahuddin, This Gender.com:2012.). Acara *Chef Master* yang disiarkan oleh stasiun televisi swasta di Indonesia, sebuah acara yang menampilkan laki-laki dan perempuan berlomba dalam kegiatan memasak disambut hangat oleh pemirsa Indonesia, hal ini menandakan bahwa laki-laki pun sudah diterima baik ranah dapur yang selama ini distereotipkan dengan perempuan.

Keberhasilan di atas merupakan perjuangan panjang kamu femisnime dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional yang menginstruksikan kepada semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG, dan dilanjutkan dengan diintegrasikannya perspektif gender ke dalam perencanaan pembangunan dan selanjutnya dituangkan kedalam GBHN (2000-2004), Propenas (2000-2004), RPJMN (2004-2009), Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Implementasi PUG di Daerah, Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan uji coba pelaksanaan anggaran responsif gender (ARG) untuk pertama kalinya dalam RPJMN 2010-2014.

Setelah 15 tahun pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia, patut kita cermati keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan melalui perspektif penelitian kebijakan publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter (dalam Wahab, 2012:135) diasumsikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan oleh/disetujui oleh pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Proses implementasi terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan yang mengandung logika yang *top-down* (pusat-daerah).

B. Tinjauan tentang pengarusutamaan gender

Berdasarkan Intruksi Presiden No.9 Tahun 2000, pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden RI No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014, pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. implementasi pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata

bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Alat analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan gender antara lain adalah 'Alur Kerja Analisis Gender' (*Gender Analysis Pathway – GAP*). Dalam GAP dipertimbangkan 4 faktor kesenjangan yaitu: akses, manfaat, partisipasi dan penguasaan atas sumber ekonomi, sosial, budaya dan politik. Selanjutnya dilakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih adil dan bermanfaat bagi laki-laki maupun perempuan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Dengan pengambilan data dari jurnal-jurnal penelitian tentang implementasi pengarus utamaan gender di Indonesia. Selain itu dari laporan dan evaluasi pelaksanaan pengarus-utamaan gender yang di publikasikan melalui media cetak maupun media *online*.

Analisis data dilakukan dengan mengolah data mentah kemudian mengcoding data berdasarkan teman dan deskripsi kemudian menghubungkan ke dua hal tersebut untuk diinterpretasikan.

4. PEMBAHASAN

Keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia akan penulis tampilkan dalam deskripsi kegiatan diberbagai sektor pembangunan di Indonesia sebagai berikut :

A. Keberhasilan implementasi PUG di bidang pendidikan

Reformasi tata kelola anggaran pada tahun 2009 yang dilakukan oleh Bappenas mengeluarkan Peraturan Menteri tentang pembentukan Panitia Pengarah dan Tim Teknis untuk Anggaran Tanggap gender dan Tanggap Kemiskinan (*Gender-Responsive Pro-Poor Budgeting*), tim tersebut terdiri dari pejabat Eselon 1 dan 2 dari enam Kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan kebudayaan. Pada tahun 2009 Kemdikbud dan enam Kementerian lainnya dipilih untuk uji coba pengembangan Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement /GBS*) serta melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting/PBB*) dari tahun 2010. Tahun 2009, beberapa wakil Kementerian telah dilatih dalam penyusunan Pernyataan Anggaran Gender yang terkait dengan Anggaran Berbasis Kinerja dan Anggaran Tanggap Gender (*Gender Responsive Budgeting /GRB*).

Keberhasilan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan Kementerian Riset teknologi dan Pendidikan Tinggi melaksanakan PUG yang dikutip dari <http://www.acdp-indonesia.org> tahun 2003 yaitu:

1. Diterbitkannya pedoman pelaksanaan, penelitian dan kertas kerja kebijakan, modul serta alat pelatihan telah dikembangkan dan disebarluaskan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hasil tersebut dicapai melalui kemitraan antara pemerintah, LSM, Pusat Kajian Gender di berbagai perguruan tinggi serta – baru-baru ini – melalui Kelompok Kerja (Pokja) Gender di tingkat pusat, provinsi serta kabupaten/kota.
2. Peningkatan kesempatan bersekolah untuk semua anak, termasuk perempuan. Selain itu, jumlah perempuan yang melanjutkan ke perguruan tinggi merupakan jumlah yang paling tinggi selama ini.
3. Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan sektor pendidikan tentang masalah-masalah kesetaraan gender dalam pendidikan
4. Kebanyakan kabupaten/kota yang dikunjungi melaporkan bahwa sudah lebih banyak perempuan yang menjadi pengawas dan kepala sekolah jika dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu. Di tingkat pusat dilaporkan bahwa lebih banyak perempuan yang menjadi pegawai negeri sipil.
5. Sudah ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi contoh pengarusutamaan gender dengan program uji coba yang inovatif untuk pendidikan formal maupun nonformal (sekolah tanggap gender). Program tersebut dibiayai oleh *block grant* dari anggaran pusat, provinsi dan – pada beberapa tempat – anggaran kabupaten/kota.
6. Pengembangan dan pelaksanaan modul pelatihan pendidikan tanggap gender untuk kepala sekolah, guru, guru bimbingan dan konseling di sekolah uji coba.
7. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang tanggap gender untuk semua mata pelajaran di semua tingkat sekolah yang ikut program uji coba.
8. Sosialisasi kesetaraan gender bagi masyarakat dan keluarga melalui media serta program non formal dan informal.
9. Semakin banyak provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan perencanaan dan anggaran tanggap gender.
10. Selama beberapa tahun terakhir ini, Sekretariat Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal telah merancang dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji coba inovatif dalam pengarusutamaan gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kesetaraan gender dalam pendidikan. Kegiatannya mencakup upaya mendukung kesetaraan gender dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di sekolah formal di semua jenjang (termasuk madrasah) dan pendidikan non formal (PKBM). Penelitian untuk Tinjauan ini menemukan adanya perubahan positif di kabupaten/kota di mana uji coba tersebut dilaksanakan. Dampak kegiatan di tingkat sekolah belum dievaluasi secara keseluruhan di tingkat pusat namun Tinjauan ini menemukan adanya contoh praktik yang baik (*good practice*) yang bisa diterapkan.

B. Keberhasilan Implementasi PUG di Bidang Ketenagakerjaan

Di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, program-program PUG diwujudkan dalam Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas pembangunan pada Prioritas 4 mengenai penanggulangan kemiskinan, melalui tindakan peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak. Di samping itu, PUG telah diakomodasikan dalam Inpres no. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, pada Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga melalui penyempurnaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

C. Keberhasilan Implementasi PUG di Bidang Kesehatan

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan yang dilakukan oleh Departemen kesehatan dengan mengeluarkan Surat Edaran No 615/Menkes/E/IV/ 2004, tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan atau yang disingkat dengan PUGBK yang ditujukan kepada seluruh Pejabat Eselon I dan II Kemenkes dan SK Menkes No. 878 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan SK Menkes No. 1981 Tahun 2011 tentang Tim PUGBK yang melibatkan seluruh Unit Utama di Kemenkes. Kemudian dengan mengeluarkan Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1459/Menkes/SK/X/2010.

D. Keberhasilan Implementasi PUG di Bidang Pertanian

Terkait dengan implementasi PUG dalam pembangunan pertanian, Departemen Pertanian telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang responsif dan berperspektif gender. Dan Program/kegiatan tersebut dilandasi kebijakan antara lain (1) menjamin partisipasi perempuan perdesaan dalam perencanaan pembangunan pertanian; (2) memenuhi kebutuhan perempuan di sektor perdesaan; (3) perspektif gender dalam ketenagakerjaan pertanian; dan (4) memfasilitasi akses perempuan perdesaan untuk mendapatkan kredit.

E. Keberhasilan Implementasi PUG di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 20/Kep/M.KUKM/VI/2014 tentang Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang KUMKM Tahun 2014, pada tanggal 29 Agustus 2014, di Jakarta. Gender Working Group (GWG), tanggal 04 Januari 2014, di hotel Cipta, Jakarta Pusat, dan tanggal 13 Januari 2014, di Gedung Permata Kuningan (Kantor APINDO).Capacity Building Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bidang KUKM Bagi Perencana/Penangjawab Program, pada tanggal 29 Agustus 2014, di Jakarta. Temu Solusi Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pemberdayaan KUMKM Responsif Gender, pada tanggal 04 September 2014, di DI. Yogyakarta. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah (melalui pengiriman form pemantauan pelaksanaan PUG pada SKPD yang membidangi KUKM).

F. Keberhasilan Implementasi PUG di Bidang Sosial

Berdasarkan berita dari www.kemsos.go.id (2015), PUG bidang Kessos di Departemen Sosial telah memulainya dari tahun 2002 antara lain :

1. Dibentuknya focal Point yang berfungsi memfasilitasi dan membantu pengarusutamaan gender dalam sektor dan menjadi penanggungjawab bagi kepentingan gender di unit/Departemen
2. Mengeluarkan SK Mensos RI No. 07/PEGHUK/2002, Tentang Pokja Pengarusutamaan Gender bidang Kesejahteraan Sosial. Anggota Pokja terdiri dari 17 orang yang terdiri dari Eselon I, II dan III. Pokja ini berfungsi sebagai Panitia Pengarah.
3. Dikeluarkannya SK Kepala Balatbangsos No. 01/PPJ/KSM/1/2002 tentang dibentuknya Tim Teknis Pokja Bidang Kesejahteraan Sosial yang anggotanya berjumlah 17 orang, terdiri dari Pejabat Eselon II,III,IV, Peneliti dan Widyaiswara
4. Melakukan Gender Analisis (Gender Analisis Pathway) untuk Repeta 2003,dengan mengambil Program 7: Pembangunan Kesejahteraan Sosial khususnya analisis pada program Kemiskinan dan Anak, bekerjasama dengan CIDA, BAPPENAS dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Adapun hasilnya telah dicetak/dibukukan melalui “Buku Analisis Gender Bidang Kesejahteraan Sosial dan Berbagi Pengalaman”.
5. Menyelenggarakan Program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang berprespektif gender melalui Proyek Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesos berwawasan Gender Pusat Tahun 2002-20046. Pada tahun 2005 dalam rangka anggaran tunggal Proyek Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial lebur kedalam anggaran Sekretariat Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, dan Bagian Program dan Informasi sebagai penanggung jawab program PUG bidang Kesos.

G. Keberhasilan Implementasi PUG dibidang Lingkungan Hidup

Berdasarkan berita yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam <http://www.menlh.go.id>, di Jakarta, Rabu, 26 Maret 2008, Kementerian Negara Lingkungan Hidup melakukan Sosialisasi dan Advokasi Strategis Pengarusutamaan Gender oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan ini, diharapkan dapat mengintegrasikan atau mengarusutamaan perspektif gender di dalam kebijakan dan program masing-masing dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sehingga kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki, dalam hal ini di dalam bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dapat diakomodir dan dipenuhi. Melalui Sosialisasi dan Advokasi Strategis Pengarusutamaan Gender kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan lingkungan hidup dan gender, dalam mengembangkan jaringan gerakan perempuan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hidup

H. Keberhasilan Implementasi PUG di Bidang Kehutanan

Berdasarkan berita pada web www.dephut.go.id yang menerangkan bahwa pada tahun 2003 di Departemen Kehutanan telah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender tingkat Departemen Kehutanan (Pokja PUG Dephut) melalui SK Menhut No. 82/Kpts-II/2003. Pokja PUG Dephut bertugas untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender di sektor kehutanan. Dalam pelaksanaannya, Pokja PUG Dephut dibantu oleh pokja PUG dari setiap Eselon I lingkup Departemen Kehutanan. Pokja PUG Dephut yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 82/KPts-II/2003, tanggal 10 Maret 2003, dan mempunyai tugas:

1. Melakukan pengarusutamaan gender di sektor kehutanan baik dalam perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek, dan perencanaan kegiatan;
2. Melakukan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender pada sektor kehutanan;
4. Melakukan koordinasi antar lintas instansi/lembaga dan antar kelompok kerja pengarusutamaan gender pada masing-masing eselon I dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Kegiatan dalam rangka pengarusutamaan gender yang telah dilaksanakan di sektor kehutanan yang dikutip dari web www.dephut.go.id (2015) antara lain:

1. Penyamaan persepsi kepada jajaran departemen kehutanan pusat (eselon I, II, III, dan IV, serta pejabat fungsional yang setara) melalui kegiatan sosialisasi gender dengan pembicara dari Meneg PP dan PSW IPB.
2. Penyamaan persepsi juga dilakukan di daerah melalui kegiatan sosialisasi. Daerah yang telah dikunjungi yaitu Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Peserta yang mengikuti sosialisasi adalah wakil-wakil dari UPT-UPT kehutanan dan beberapa dinas kehutanan di propinsi tersebut. Pembicara dalam acara tersebut adalah dari Pusat Studi Wanita (PSW) Perguruan Tinggi setempat atau dari Biro Pemberdayaan Perempuan yang ada di Propinsi tersebut.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait melalui rapat dan studi banding (seperti Pusat Studi Wanita, Perguruan tinggi, dan instansi yang telah melaksanakan pengarusutamaan gender). Instansi yang telah dikunjungi yaitu: Departemen Pertanian, Departemen Kehakiman dan HAM, BPPT, BKKBN, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kantor Meneg PP.

Menyusun atau mengumpulkan data terpilah gender (belum lengkap); menyusun buku *Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Departemen Kehutanan* (telah disahkan [Keputusan Menteri Kehutanan No. 528/Menhut-II/Peg/2004](#)); dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan leadership terutama bagi eselon III dan IV serta staf senior perempuan lingkup

Dephut pusat. pokja PUG masing-masing Eselon I telah melakukan analisis gender terhadap data dan perencanaan kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selain itu, pokja PUG Eselon I juga berupaya untuk menindaklanjuti buku panduan sesuai kegiatan yang ada dan mengimplementasikannya dalam perencanaan program dan kegiatan masing-masing.

I. Keberhasilan implementasi PUG dibidang Kelautan dan Perikanan

Dengan dilakukannya kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 06 MEN-KP/KB/III/2011 dan No 12 tahun 2011 tentang Peningkatan Efektifitas Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan PNPM Mandiri bidang kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pendapatan dengan membentuk Pengembangan Usaha Mina Desa dan Pemberdayaan Usaha Garam rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender telah dilakukan di berbagai sektor/bidang pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan PUG dalam pembangunan bahwa Kementerian/Lembaga di pusa, provinsi serta kabupaten/kota yang diteliti telah memiliki dukungan politik, kelembagaan PUG, program yang responsif gender, data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin, dan sumber daya manusia dengan keterampilan melaksanakan PUG) yang diperlukan untuk melaksanakan PUG. Kegiatan yang kontinu terus dilakukan dengan sosialisasi gender relatif sering dilakukan, bahkan beberapa Kementerian/Lembaga sudah menyelenggarakan pelatihan analisis gender. Hal ini membawa dampak baik bagi pejuang keadilan dan kesetaraan gender terutama para feminisme baik di pusat maupun di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. (2012). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahmud, Muh Arbain. (2015). *Gender dan Kehutanan Masyarakat*. Yoyakarta: Deepublish
- Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia
- Nugroho, Riant. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Ritzer, Gorge dan Goodman, Douglas J. (2012)). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup
- Solichin, Wahab Abdul. (2012). *Analisis kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers



Peraturan

Inpres No.9 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender
RPJM Tahun 2010-2014

Internet

[www. Depkes.go.id](http://www.depkes.go.id). di Unduh 10 Agustus 2015 pukul 12.00 Wib

<http://www.acdp-indonesia.org/wp-content/uploads/2013/10/ACDP-005-Kaji-Ulang-Satu-Dekade-Pengarusutamaan-Gender-Bidang-Pendidikan-di-Indonesia-Ringkasan-Eksekutif.pdf>: di Unduh 10 Agustus 2015 pukul 12.50 Wib

www.dephut.go.id. di Unduh 10 Agustus 2015 pukul 13.00 Wib

http://www.forda-mof.org//files/PUG_Birocan.pdf : di Unduh 10 Agustus 2015 pukul 17.30 Wib

[www. stasore.com/2010/05/06/biaya-pembinaan-kesetaraan-gender-depnakertrans-belum-jelas](http://www.stasore.com/2010/05/06/biaya-pembinaan-kesetaraan-gender-depnakertrans-belum-jelas) : di Unduh 10 Agustus 2015 pukul 15.08 Wib

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150501140000-24-50513/asa-waria-timbul-tenggelam-di-tengah-realita/>: di Unduh 10 Agustus 2015 pukul 18.09 Wib

<http://www.depkop.go.id> : diunduh 10 Agustus 2015 pukul 20.00 Wib

www.kemenpppa.go.id/index.php : diunduh 10 Agustus 2015 pukul 15.45 Wib